

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah sebuah sistem politik dengan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan di suatu negara. Demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan itu secara langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada kesepakatan mayoritas secara bebas dari rakyat.¹

Proses demokratisasi masyarakat mengakibatkan berbagai perubahan tatanan sosial dan politik yang harus disiapkan untuk memberi kemungkinan bagi perwujudannya. Keterlibatan masyarakat dalam proses demokratisasi dan sebagai sebuah gagasan adalah lebih realistis untuk membangun masyarakat yang berdasar nilai demokrasi dibandingkan hanya membangun demokrasi dalam konteks perangkat institusionalnya berdasarkan konsep yang ideal dan universal sehingga partisipasi politik merupakan suatu hal yang penting dalam proses demokratisasi².

Partisipasi politik mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu sistem politik yang demokratis. Dengan kata lain, salah satu tolak ukur suatu sistem politik yang demokratis adalah apabila ada partisipasi politik. Sistem politik tidak akan ada artinya tanpa adanya partisipasi politik. Partisipasi politik sering dianggap sebagai salah satu indikator terpenting berlangsungnya proses pembangunan politik dan demokrasi suatu negara.

¹ Eddi Wibowo & Hessel Nogi S.Tangkilisan, *Kebijakan Publik Pro Civil Society*, Yogyakarta: YPAPI, 2004, hal.61

² *Ibid.* Hal 62

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting untuk dipelajari dalam analisis politik modern. Dimana partisipasi politik menjadi tolak ukur dari berjalannya demokrasi pada suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi tersebut. Miriam Budiardjo (2009:367) menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Dengan demikian Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah.³

Menurut Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of The Social Sciences* partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum⁴. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Setiap keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka mereka berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.⁵

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri,⁶ karena keputusan politik yang

³ Miriam Budiardjo.2009. Dasar-dasar Ilmu Politik.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 367

⁴Miriam Budiardjo.1996. Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila .Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 183

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 1992, hal.140

⁶Peter L. Berger. 1976. Pyramids of sacrifice: Political Ethics and Social Change. New york: Anchor Books Hal. Xii dan 60

dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat maka masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya.⁷

Menurut Gabriel Almond, partisipasi politik mencakup tentang partisipasi kolektif yang terbagi antara partisipasi konvensional dan non-konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional adalah pemberian suara, aktivitas diskusi politik, kegiatan kampanye, aktivitas membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan lain, dan komunikasi individu dengan pejabat politik. Kemudian, bentuk partisipasi non konvensional adalah bentuk partisipasi politik tidak normal, termasuk diantaranya ada yang legal, non legal, keras, dan revolusioner seperti pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, aksi mogok, kekerasan politik dan revolusi.⁸

Salah satu bentuk partisipasi politik *konvensional* dan merupakan bentuk partisipasi yang paling sering diukur adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut, bentuk partisipasi yang paling kongkret adalah pemberian suara dalam Pemilu. Dalam hal ini, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu hanya melibatkan keikutsertaan masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilu untuk memilih dan menentukan wakil rakyat dan pemimpin mereka baik dipusat maupun di daerah. Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat dalam memberikan hak suaranya dalam pemilu menjadi penting, karena hal tersebut menentukan siapa-siapa saja yang akan mengisi jabatan-

⁷Ramlan Subakti. Op.Cit. hal 140.

⁸Almond dalam Mochtar Masoed. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm. 25.

jabatan pemerintahan dan hal ini sangat terkait dengan kehidupan masyarakat itu sendiri dalam suatu negara.

Pentingnya partisipasi warga negara dalam memberikan suaranya dalam pemilu ternyata tidak diikuti oleh kesadaran politik warga negara itu sendiri. Fenomena politik yang saat ini terjadi adalah masih banyaknya warga negara yang tidak memberikan suaranya pada Pemilu.

Dalam hal ini, munculnya fenomena banyaknya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu menjadi menarik untuk dilihat sebagai akibat masih kurangnya kesadaran masyarakat dan adanya rasa lelah politik rakyat. Menurut Hamdi Muluk, rasa lelah politik rakyat banyak menyaksikan peristiwa dan proses-proses politik sebenarnya mudah untuk ditenggarai tanpa perlu melakukan survei dan penelitian. Paling tidak, dari sikap-sikap apatis-tidak mau peduli, tidak mau percaya, tidak mau patuh lagi, semua itu adalah cerminan dari rasa lelah (mungkin juga frustrasi), rasa ketidakberartian, ketidakmenentuan, rasa keterasingan dan gejala ini disebut juga sebagai alienasi politik.⁹

Hal ini seperti yang dikatan Rush yang menyatakan bahwa alienasi dapat menyebabkan seseorang berpartisipasi atau tidak berpartisipasi (dalam politik).¹⁰ Dalam hal ini, alienasi oleh Robert Lane dinyatakan sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan dan masyarakat serta kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain dan mengikuti aturan yang tidak adil. Kelompok orang-orang ini menganggap pemerintahan sebagai keberadaan yang tidak ada

⁹Hamdi Muluk, 2010, Psikologi Politik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 26.

¹⁰ Robert Lane, sebagaimana dikutip Rush, Michael. Althof, Phillip. Pengantar Sosiologi Politik, PT. Rajawali, Jakarta, 1989, Hal 149

artinya serta tidak memberikan konsekuensi terhadap mereka.¹¹ Sejalan dengan itu, Yinger dalam hal ini mendefinisikan alienasi politik sebagai sebuah bentuk kehilangan keterhubungan (*loss of a relationship*), kehilangan rasa partisipatif (*loss of participation*), dan kehilangan kemauan mengendalikan (*loss of control*) dalam kaitannya dengan proses politik¹².

Munculnya gejala alienasi politik tentunya memiliki ancaman yang serius bagi perkembangan politik dan demokrasi dalam suatu negara. Menurut Hamdi Muluk,¹³ ada beberapa bahaya yang mengintip dari alienasi politik yaitu : Pertama, sukarnya mendorong tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dan konstruktif. Kondisi Alienasi politik yang tinggi cenderung mengakibatkan proses penarikan diri (*withdrawal*) terhadap aktivitas politik. Kedua, meningkatnya ketidakpercayaan politik (*political untrust*). Ketidakpercayaan politik memang bisa menjadi antaseden untuk tidak berpartisipasi dalam politik, namun bisa juga menjadi antaseden untuk tindakan-tindakan politik menyimpang diluar aturan konvensional. Gejala-gejala, “parlemen jalanan”, aksi boikot, merupakan cerminan perasaan ketidakpercayaan ini. Ketiga, dukungan terhadap keberlanjutan (*political support & political sustainability*) bisa terancam. Tentunya ketiadaan dukungan terhadap keberlanjutan suatu sistem politik suatu negara merupakan problem yang sangat serius, itu artinya sama dengan bubarnya sistem politik suatu negara.

Sebagai sebuah kondisi sosial, alienasi politik memiliki beberapa dimensi atau ciri-ciri pokok. Dalam hal ini, membagi dimensi alienasi politik menjadi

¹¹Robert Lane, sebagaimana dikutip Rush, Michael. Althof, Phillip. Pengantar Sosiologi Politik, PT. Rajawali, Jakarta, 1989, Hal 149.

¹²Yinger (1973) sebagaimana dikutip Hamdi Muluk, 2010, Psikologi Politik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 26.

¹³Ibid., Hlm. 27-28.

empat cirik pokok yaitu *powerlessness* (ketidakberdayaan politik), *political meaningfulness* (ketidakbermaknaaan politik), *perceived politicalnormlessness* (ketidakjelasan norma-norma politik), dan *politicalisolation and self-estrangement* (keterasingan dan isolasi politik).

Powerlessness sebagai salah satu dimensi alienasi politik menurut Finifter merupakan suatu gejala mulai berkembangnya rasa ketidakberdayaan dalam masyarakat. Artinya rakyat mulai sangsi apakah mereka mampu berbuat sesuatu untuk mengubah realitas sosial politik yang terjadi dan yang akan terjadi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi politik ini menunjukkan perasaan politik seseorang tidak memiliki kekuatan atau keinginan dari dalam dirinya untuk ikut serta dalam pemilu karena merasa tidak berdaya dalam artian suaranya dalam pemilu tidak akan mampu merubah kondisi kehidupannya.¹⁴

Selain itu, gejala selanjutnya yang juga menunjukkan dimensi alienasi politik menurut adalah mulai dirasakannya adanya suatu ketidakbermaknaaan politik (*political meaningfulness*), dalam artian semua keputusan-keputusan dan proses-proses politik menjadi sesuatu yang “absurd” dan makin sukar untuk diramalkan. Hal ini terlihat dari realitas politik yang terjadi akhir-akhir ini, banyak orang berkomentar, jangankan kami sebagai orang yang awam politik, para pengamat politik saja tidak mampu meramalkan atau memprediksi mau kemana arah politik yang terjadi di Indonesia ini.¹⁵

Kemudian, dimensi lain dari alienasi politik menurut adalah *Perceived political Normlessness* yang dalam hal ini semakin tidak jelasnya norma-norma

¹⁴Ibid., hlm. 26

¹⁵Ibid., hlm. 27

politik yang dianut di tengah-tengah masyarakat. Artinya minimal pada taraf persepsi, kita semakin yakin bahwa norma-norma dan aturan yang mengatur tata kehidupan politik kita semakin tidak jelas, dan pada kenyataannya, norma-norma politik tersebut memang nyaris tidak terdengar. Lalu dimensi terakhir dari alienasi politik menurut yaitu (*political isolation and self-estrangement*), dimana perasaan keterasingan dan keterisolasian seseorang dari proses-proses politik. Reaksi dan dampak dari keterasingan ini adalah proses menarik diri, rasa skeptis, apatis dan tidak mau tahu dengan segala hal-hal yang menyangkut kepentingan politik bersama.¹⁶

Adanya gejala alienasi politik masyarakat dalam partisipasi politik terlihat dari kajian Horton dan Thomson yang melakukan penelitian mengenai alienasi politik dimana hasilnya menunjukkan bahwa individu yang mendapatkan skor tinggi dalam alienasi (keterasingan), dapat dipertimbangkan akan lebih memungkinkan melakukan penentangan terhadap pemilihan dibandingkan dengan yang skor alienasi yang rendah. Lebih lanjut Horton dan Thomson menyimpulkan bahwa diantara kelompok yang merasakan *powerlessness* dan yang merasakan *power concious*, melakukan pemilihan dapat berubah menjadi ekspresi dari protes politik, yaitu melawan sebuah pemerintahan yang ada.¹⁷ Hal yang sama juga terlihat dari penelitian Templeton yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara alienasi politik dan tingkat partisipasi politik¹⁸.

Selanjutnya, dalam menjelaskan alienasi politik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi alienasi politik dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari kajian

¹⁶Ibid.,

¹⁷Horton dan Tomson dalam Robinson (1973) sebagaimana dikutip oleh R. Ali Aulia., Op. Cit. hlm. 33.

¹⁸Templeton (1996) sebagaimana dikutip Hamdi Muluk, Op. Cit., hlm. 27

menarik Michael J.Wood yang berjudul *Political Alienation in American society*. Menurut J.Wood, ada beberapa faktor yang mempengaruhi alienasi politik yaitu posisi yang tidak menguntungkan dalam masyarakat : peran ras dan kelas, gender, keanggotaan dalam partai politik, kekuatan afiliasi partai politik, kandidat presiden yang lebih disukai, keterikatan terhadap kewarganegaraan, serta hubungan antar jenis kelamin dan pendidikan.¹⁹

Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi alienasi politik adalah kekuatan afiliasi seseorang dengan partai politik. Dalam hal ini J. Wood menyatakan bahwa mereka yang berafiliasi sangat kuat dengan salah satu partai politik akan lebih rendah terasing secara politik dari mereka yang kurang atau bahkan tidak berafiliasi sama sekali dengan partai politik.²⁰ Wood berangkat dari teori identitas sosial yang menyatakan bahwa individu akan membangun konsep diri mereka sendiri berdasarkan partisipasinya dalam kelompok sosial tempat mereka berada.²¹ Teori ini memprediksi bahwa individu akan mengadopsi tingkah laku dan kepercayaan yang dimiliki oleh anggota kelompok lainnya.²²

Faktor lain yang juga cukup menarik mempengaruhi alienasi politik adalah keterikatan pada kewarganegaraan (*civic engagment*). Wood menyatakan rendahnya tingkat partisipasi politik merupakan indikasi dari tingginya tingkat keterasingan politik. Oleh karena itu, Wood menyatakan bahwa mereka yang terlibat dalam hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan maka akan memiliki kecenderungan alienasi politik yang rendah dari pada mereka yang tidak.²³ Dalam

¹⁹ Michael J.Wood, 2014, *Political Alienation in Society*, UVM Honors College Senior Theses, Paper 38, hlm. 11-14.

²⁰ Ibid., hlm. 11

²¹ Turner sebagaimana dikutip Wood., Ibid.,

²² Bettencourt dan Hume sebagaimana dikutip Wood., Ibid.,

²³ Wood., Ibid., hlm. 12.

penelitian ini peneliti memakai 2 faktor ini sebagai variabel dari faktor yang mempengaruhi alienasi masyarakat di Kecamatan Padang Timur karena dari wawancara yang dilakukan dengan warga sebagai data awal yang ditemukan dilapangan, peneliti menemukan bahwa masyarakat Kecamatan Padang Timur memiliki kecendrungan rendahnya ketertarikan dan kepercayaan terhadap partai politik, dan rendahnya kepedulian terhadap organisasi, lingkungan masyarakat serta ajakan dari pemerintah sehingga memiliki kecendrungan tidak terikat terhadap kewarganegaraan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Syamsul Bahri dan Tio Marsya.²⁴

Adanya gejala alienasi politik masyarakat juga terlihat di Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh hasil penelitian Gebi Angelina Zahra pada tahun 2014 yang meneliti tentang Hubungan Alienasi Politik dengan Intensi Golput pada Mahasiswa Anggota BEM Universitas Negeri Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara alienasi politik dengan intensi golput pada mahasiswa anggota BEM Universitas Negeri Malang.²⁵

Kecendrungan adanya gejala alienasi politik masyarakat dalam pemilu juga terlihat di kota Padang khususnya pada Pilkada Langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang putaran kedua tahun 2014. Dalam Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014 ini, masyarakat yang tidak berpartisipasi atau tidak memberikan suaranya dalam Pilkada padang tergolong tinggi, yakni hampir setengah jumlah pemilih tidak ikut berpartisipasi atau tidak ikut memberikan suaranya pada Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014. Selain itu, pada Pilkada Padang

²⁴ Lihat Hal. 17 dan Hal. 18

²⁵Lihat lebih lanjut Skripsi Ge Angelina Zahra, Hubungan Alienasi Politik dengan Intesitas Golput Pada Mahasiswa Anggota BEM Universitas Negeri Malang, Skripsi,Malang, FISIP, Universitas Negeri Malang.

putaran kedua ini, jumlah masyarakat yang tidak berpartisipasi atau tidak memilih lebih besar dibandingkan pada Pilkada Padang putaran pertama. Artinya terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang tidak memilih pada Pilkada Padang putaran kedua. Berikut akan disajikan data hasil rekapitulasi Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014.

Tabel 1.1
Data Hasil Rekapitulasi Pilkada Padang Putaran
Kedua Tahun 2014

No	Kecamatan	DPT	Total Pemilih	Persentase (%)	Suara Tidak Sah	Tidak Memilih	Persentase (%)
1.	Bungus Teluk Kabung	15.929	8.996	56,48	137	6.933	43,52
2.	Koto Tengah	113.047	60.485	53,50	917	52.562	46,50
3.	Kuranji	87.262	45.916	52,62	506	41.346	47,38
4.	Lubuk Begalung	71.844	39.084	54,40	568	32.760	45,60
5.	Lubuk Kilangan	32.028	17.566	54,85	260	14.462	45,15
6.	Nanggalo	36.996	19.381	52,39	314	17.615	47,61
7.	Padang Barat	32.307	16.112	49,87	215	16.195	50,13
8.	Padang Selatan	41.222	22.191	53,83	407	19.031	46,17
9.	Padang Timur	54.906	27.220	49,58	384	27.686	50,42
10.	Padang Utara	37.274	18.746	50,29	266	18.528	49,71
11.	Pauh	37.470	20.333	54,26	223	17.137	45,74
Total		560.285	296.030	52,84%	4.197	264.255	47,16%

Sumber : Data Sekunder KPU Kota Padang tahun 2014

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang tidak memilih pada Pilkada Padang berjumlah 264.255 atau 47,16%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah pemilih yang tidak memilih pada Pilkada Padang putaran kedua dan tergolong tinggi. Seperti yang dikatakan oleh pengamat politik Burhanuddin Muhtadi Analisis Politik Charta Politika Indonesia dan Dosen UIN Jakarta bahwa “Secara teoritik, kenaikan jumlah golput dipicu meluasnya perasaan alienasi politik bahwa pemilu tidak terkait dengan kepentingan

pragmatis pemilih. Efikasi politik yang rendah terhadap proses-proses politik, termasuk masalah pemilu, membuat mereka merasa bahwa pilihan suara mereka tidak bakal mengubah keadaan”.²⁶ Tentunya pernyataan ini menunjukkan bahwa alienasi politik pada umumnya sudah terjadi di Indonesia.

Kemudian dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang, jumlah masyarakat yang tidak memilih paling banyak terdapat di Kecamatan Padang Timur sebesar 27.686 orang atau 50,42 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang tidak memilih pada Pilkada Padang putaran kedua tergolong tinggi, dan jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Padang Timur.

Berdasarkan data di atas memperlihatkan hampir sebagian pemilih di Kecamatan Padang Timur tidak ikut serta memberikan suaranya pada Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014. Gejala ini tentunya memperlihatkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Padang Timur pada Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014. Tentunya hal ini menjadi menarik untuk melihat adanya gejala alienasi politik masyarakat Kecamatan Padang Timur pada Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014.

Dalam hal ini, gejala alienasi politik masyarakat di Kecamatan Padang Timur pada Pilkada Padang Putaran kedua tahun 2014 salah satunya terlihat dari berkembangnya rasa ketidakberdayaan masyarakat (*Powerlessness*) terhadap proses-proses politik khususnya dalam memberikan suara pada Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014. Hal ini terlihat dari pernyataan salah seorang warga Kecamatan Padang Timur yang tidak ikut memilih pada Pilkada Padang putaran

²⁶Lihat lebih lanjut Artikel Burhanuddin Muhtadi yang dimuat Koran Sindo Edisi Rabu 7 Januari 2009.

kedua tahun 2014 yang bernama Silfi Aner, S.E (26 Tahun) yang bekerja sebagai

Pembina Yayasan TK Aisyiah di Cengkeh menyatakan bahwa :

*Manga sato lo wak mamilih Walikota patang... awak ka mode-mode iko jonyo... rakyat ndak didanga nyo dek pemerintah lai... untuak kana mamilih wak lai.... rakyat ndak ka makmur gai doh... lai tahu nyo pakiak rakyat tu... keluhan rakyat tu ndak do ka didangaan doh kan...*²⁷

(Mengapa akan memilih walikota kemaren, saya akan seperti ini juga, rakyat tidak lagi di dengar oleh pemerintah, untuk apa memilih, rakyat tidak akan makmur, tahu tidak pemerintah pekik rakyat itu, keluhan rakyat tu tidak akan didengarkan)

Hal ini, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Zakaria 47 tahun bekerja sebagai pedagang yang menyatakan bahwa:

*Ambo indak sato mamilih Walikota Padang patang tu dek suaro ambo ko ndak dihitung bagai doh... ndak ka bapangaruah bagai doh. ambo urang biaso-biaso c nyo mah.... kok sato gai ambo mamilih alun tantu gai ka tapiliah pemimpin nan elok lai... bialah urang-urang nan labiah mangarati pado ambo jo nan mamilih.. lah didalam ambo atu mah... labiah ancak jo ambo ndak mamilih lai...*²⁸

(Saya tidak ikut memilih walikota padang itu dikarenakan suara saya ini tidak akan dihitung, tidak akan berpengaruh juga, saya ini orang biasa-biasa saja. Kalau ikut juga memilih belum tentu juga akan terpilih pemimpin yang baik, biarlah orang yang lebih mengerti daripada saya yang memilih, berarti sudah termasuk saya juga. Lebih bagus saya tidak ikut memilih)

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa adanya rasa ketidakberdayaan atau tidak adanya kekuatan dan keinginan beberapa masyarakat Kecamatan Padang Timur dalam mempengaruhi proses politik dalam hal ini tidak ikut berpartisipasi dalam Pilkada Padang. Dalam hal ini, beberapa masyarakat merasa tidak berdaya atau tidak yakin dengan kemampuannya bahwa mereka akan mampu merubah kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik dengan cara ikut

²⁷Wawancara Silfi Aner, S.E salah satu warga Kecamatan Padang Timur yang tidak memilih pada Pilkada Padang Putaran Kedua Tahun 2014, 14 Januari 2015, pukul 18.14 WIB, di Rumah Kediannya. Marapalam Raya, No 20 RT 3 RW 06 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur.

²⁸Wawancara Zakaria, salah satu warga Kecamatan Padang Timur yang tidak memilih pada Pilkada Padang Putaran Kedua Tahun 2014, 14 Januari 2015, pukul 17. 15 WIB, di Rumah Kediaman Syamsul Bahri, Jl. Marapalam Raya, RT 3 RW 5 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur.

serta memilih pemimpin yang lebih baik di daerahnya melalui Pilkada Padang. Selain itu, masyarakat merasa tidak berdaya terhadap pemerintah dengan tidak didengarnya aspirasi rakyat selama ini oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Padang Timur memperlihatkan gejala alienasi politik dari dimensi ketidakberdayaan masyarakat terhadap proses-proses politik dengan tidak ikut serta memilih pada Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014.

Selanjutnya, adanya gejala alienasi politik masyarakat di Kecamatan Padang Timur pada Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014 terlihat dari dimensi ketidakbermaknaan politik (*political meaninglessness*), dalam artian semua keputusan-keputusan dan proses-proses politik menjadi sesuatu yang tidak bermakna dan sulit untuk diramalkan, dimana hal ini dapat dilihat dengan persepsi dari masyarakat bahwa keikutsertaan dan pilihan-pilihan politiknya pada Pilkada Padang putaran kedua merupakan sesuatu yang tidak bermakna karena pilihan dan keikutsertaannya dalam pemilihan tersebut tidak bisa meramalkan bahkan menjamin hasil atau konsekuensi dalam penggunaan hak suara dan pilihan tersebut untuk bisa mengubah kondisi sosial. Hal ini terlihat dari pernyataan salah seorang warga Kecamatan Padang Timur yang tidak ikut memilih pada Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014 yang bernama Jumpriadi (27 tahun) yang bekerja sebagai wiraswasta yang menyatakan bahwa :

*Ambo maleh sato mamilih Walikota Patang...dipilih bana alun tantu jo mauntuangan awak lai...alun tantu nyo mamikiahan awak doh, pokoknyo alun tantu mauntuangan k awak lai..alun tantu ado feed back nyo ka masyarakaik lai...*²⁹

²⁹Wawancara dengan Jumpriadi, salah satu warga Kecamatan Padang Timur yang tidak memilih pada Pilkada Padang Putaran Kedua Tahun 2014, 14 Januari 2015, pukul 16.14 WIB, Di kedainya depan Polsek Padang Timur.

(Saya malas ikut memilih walikota padang kemaren, dipilihpun belum tau juga menguntungkan saya, belum tau akan memikirkan saya, pokoknya belum tahu akan menguntungkan, belum tentu ada feedbacknya kemasyarakat)

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Syamsul Bahri (55 tahun)

yang bekerja sebagai wiraswasta yang menyatakan bahwa:

Baa ambo ka sato mamilih Walikota patang... visi dan misi calon tu jo alun tantu sasuai jo kenyataan lai... banyak janji-janji politik ko nan mangkir sabalum-sabalumnyo, jadi ambo indak picayo jo janji-janji politik tu dek alun tantu ka terlaksana lai..³⁰

(Bagaimana saya akan ikut memilih Walikota kemaren, visi dan misi calon itu belum tentu sesuai dengan kenyataan, banyak janji-janji politik yang mangkir sebelum-sebelumnya, jadi saya tidak percaya dengan janji-janji politik itu karena belum tentu akan terlaksana)

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa adanya gejala ketidakbermaknaan politik dari beberapa masyarakat Kecamatan Padang Timur dalam hal ini tidak ikut berpartisipasi dalam Pilkada Padang. Dalam hal ini, beberapa masyarakat merasa bahwa keikutsertaan dan pilihan-pilihan politiknya pada Pilkada Padang putaran kedua merupakan sesuatu yang tidak bermakna karena pilihan dan keikutsertaannya dalam pemilihan tersebut tidak bisa meramalkan bahkan menjamin terjadinya perubahan kondisi sosial.

Kemudian, adanya gejala alienasi politik masyarakat di Kecamatan Padang Timur pada Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014 juga terlihat dari dimensi (*perceived political normlessness*) yakni semakin tidak jelasnya norma-norma politik yang dianut. Dalam hal ini muncul persepsi individu terhadap norma-norma/atau nilai yang dikehendaki dalam hubungan pembentukan politik telah

³⁰Wawancara Syamsul Bahri, salah satu warga Kecamatan Padang Timur yang tidak memilih pada Pilkada Padang Putaran Kedua Tahun 2014, 14 Januari 2015, pukul 16.38 WIB, di Rumah Kediannya, Jl. Marapalam Raya, RT 3 RW 5 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur.

diabaikan. Hal ini terlihat dari pernyataan salah seorang warga Kecamatan Padang Timur yang tidak ikut memilih pada Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014 yang bernama Ardiles (28 Tahun) yang bekerja sebagai Wiraswasta menyatakan bahwa:

Manga nyo dipiliah... politik ko kotor mah... duit-duit jo nyo mah..di Indonesia ko KKN lah berlaku, jadi untuak kana na mamiliah lai... sistemnyo ko ka dirubah.. kalau transparan sistemnyo, baru ikuik wak mamiliah mah... ko indak, lah sahari ka mamiliah Walikota, lah main pitih jo calon ko sadonyo lai.. bisuak ko kalau lah duduak nyo, pasti ka mamulangan pokok jo karajonyo... ujuang-ujungnyo korupsi....³¹

(Mengapa dia dipilih, politik itu kotor, duit-duit saja, di Indonesia ini KKN sudah berlaku, jadi untuk apa lagi memilih, sistemnya yang akan dirubah, kalau transparan sistemnya, baru saya ikut memilih. ini tidak, sehari sebelum pemilihan, sudah main uang para calo ini semuanya, besok kalau sudah duduk, pasti ingin memulangkan modal saja kerjanya, ujung-ujungnya korupsi)

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa munculnya persepsi masyarakat bahwa norma-norma politik khususnya dalam proses pelaksanaan Pilkada Padang putaran kedua cenderung diabaikan bahkan tidak terlihat mana yang boleh dan mana yang tidak. Maraknya politik uang dan pelanggaran lainnya pada Pilkada Padang oleh para calon menjadi sesuatu yang biasa terlihat secara kasat mata menjelang Pilkada Padang putaran kedua yang mendorong sebagian masyarakat Kecamatan Padang Timur tidak ikut memilih pada Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014.

Selanjutnya, dimensi alienasi politik masyarakat yang terlihat dalam Pilkada Padang Putaran kedua tahun 2014 adalah adanya perasaan keterasingan dan keterisolasian dari proses-proses politik dalam hal ini terisolsi dari proses Pilkada

³¹Wawancara Ardiles, salah satu warga Kecamatan Padang Timur yang tidak memilih pada Pilkada Padang Putaran Kedua Tahun 2014, 14 Januari 2015, pukul 18.39 WIB, di Rumah Kediamanya, Jl. Marapalam Raya, No 20, RT 3 RW 06 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur.

Padang putaran kedua. Hal ini, terlihat dari pernyataan Asma (68 Tahun) tidak bekerja menyatakan bahwa :

*Baa ambo ka mamilih Walikota nan kaduo ko lai, nan putaran kaduo ko ambo ndak dapek kartu untuk mamilih lai doh... padahal putaran partamo ambo dapek kartu, dan ambo sato mamilih... lah nan kaduo ko ndak dapek ambo kartu lai doh....*³²

(Bagaimana saya akan memilih walikota yang kedua, putaran kedua ini saya tidak dapat kartu untuk memilih, padahal putaran pertama saya dapat kartu undangan, dan ikut serta memilih, yang kedua tidak dapat kartu lagi)

Perasaan terasing terhadap politik ini juga terlihat dari pernyataan Tio Marsya (20 Tahun) Mahasiswa menyatakan bahwa :

*Maleh wak mamilih Walikota patang..wak ndak acuah bana jo politik doh... wak ndak peduli bana jo politik ko doh...*³³

(Malas saya ikut memilih walikota patang, saya tidak terlalu acuh dengan politik ini, saya tidak terlalu peduli dengan politik ini)

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bagaimana keterasingan politik sebagian masyarakat Kecamatan Padang Timur, dimana sebagian masyarakat tidak memperoleh kartu pemilihan dari panitia pemilihan sehingga mereka tidak bisa memberikan suaranya dalam Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014. Selain itu, perasaan keterasingan politik masyarakat juga terlihat dari sikap ketidakpedulian atau antipati terhadap politik khususnya ikut serta dalam Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014.

Berdasarkan realita di atas, memperlihatkan bagaimana sebagian masyarakat Kecamatan Padang Timur memperlihatkan adanya gejala dari dimensi-dimensi alienasi politik dalam kaitannya dengan banyaknya masyarakat yang tidak ikut

³²Wawancara Asma, salah satu warga Kecamatan Padang Timur yang tidak memilih pada Pilkada Padang Putaran Kedua Tahun 2014, 14 Januari 2015, pukul 17.40 WIB, di Rumahnya Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur.

³³Wawancara Tio Marsya, salah satu warga Kecamatan Padang Timur yang tidak memilih pada Pilkada Padang Putaran Kedua Tahun 2014, 14 Januari 2015, pukul 19.45 WIB, di Rumahnya Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur.

memilih pada Pilkada Padang putaran kedua tahun 2014. Dalam hal ini, adanya gejala alienasi masyarakat ini dipengaruhi oleh rendahnya kekuatan afiliasi masyarakat terhadap partai politik. Hal ini terlihat dari pernyataan selanjutnya dari Syamsul Bahri salah seorang masyarakat Kecamatan Padang Timur yang tidak ikut memilih pada Pilkada Padang 2014 yang sebelumnya diwawancarai peneliti, yang juga menyatakan bahwa:

*Ambo yo ndak picayo jo janji-janji politik ko do... apo laii partai politik nan bajanji ka masyarakat...partai ko ado pas ka kampanye se datang ka masyarakat, siap tu bajanji-janji... dimaa lo urang ka picayo ka partai politik nan ado ko...*³⁴

(Saya tidak percaya dengan janji-janji politik, apalagi partai politik yang berjanji kemasyarakat, partai itu ada hanya pas kampanye datang kemasyarakat, setelah itu berjanji-janji saja, bagaimana masyarakat akan percaya dengan partai politik yang ada ini).

Pernyataan diatas memperlihatkan kecendrungan rendahnya tingkat kepercayaan salah seorang masyarakat terhadap partai politik yang memperlihatkan bagaimana rendahnya kekuatan afiliasi seseorang terhadap partai politik. Hal ini kemudian mendorong mereka untuk tidak peduli dengan politik dan tidak memilih pada Pilkada Padang 2014, karena ketidakpercayaan terhadap pasangan calon yang di usung oleh partai politik.

Kemudian, adanya gejala alienasi politik masyarakat Kecamatan Padang Timur pada Pilkada Padang ini juga terlihat dipengaruhi oleh rendahnya keterikatan terhadap kewarganegaraan. Hal ini terlihat dari pernyataan Marsya (20 Tahun) salah seorang masyarakat Kecamatan Padang Timur yang tidak ikut

³⁴ Wawancara Syamsul Bahri, salah satu warga Kecamatan Padang Timur yang tidak memilih pada Pilkada Padang Putaran Kedua Tahun 2014, 14 Januari 2015, pukul 16.38 WIB, di Rumah Kediannya, Jl. Marapalam Raya, RT 3 RW 5 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur.

memilih pada Pilkada Padang 2014 yang sebelumnya diwawancarai peneliti, juga menyatakan bahwa:

*Awak ndak ado ikuik-ikuik organisasi di siko do, dan jarang lo menghadiri rapek-rapek atau kegiatan yang ado disekitar siko dek awak sibuk dek kuliah lo... jadi awak kurang tau tentang kondisi disiko apolai tentang politik awak ndak acuah bana do...*³⁵

(Saya tidak ada ikut organisasi disini dan jarang menghadiri rapat-rapat atau kegiatan yang ada disekitar sini karena sibuk kuliah, jadi kurang tau tentang kondisi disini apalagi tentang politik tidak terlalu acuh bana).

Pernyataan di atas memperlihatkan kecenderungan rendahnya kepedulian dan keterlibatan sebagian masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan organisasi yang memperlihatkan bagaimana rendahnya keterikatan terhadap kewarganegaraan. Hal ini kemudian mendorong mereka untuk tidak peduli dengan urusan politik dan tidak memilih pada Pilkada Padang 2014, karena rendahnya kesadaran dan keterlibatan mereka dalam hal asosiasi-asosiasi atau organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melihat adanya gejala- gejala alienasi politik yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Padang Timur pada Pilkada Langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang putaran kedua pada tahun 2014 yang memperlihatkan adanya kecenderungan rendahnya kekuatan afiliasi masyarakat terhadap partai politik serta rendahnya keterikatan terhadap kewarganegaraan sebagai faktor yang mempengaruhi alienasi politik. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan antara kekuatan afiliasi terhadap partai

³⁵ Wawancara Tio Marsya, salah satu warga Kecamatan Padang Timur yang tidak memilih pada Pilkada Padang Putaran Kedua Tahun 2014, 14 Januari 2015, pukul 19.45WIB, di Rumahnya Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur.

politik dan keterikatan terhadap kewarganegaraan dalam mempengaruhi alienasi politik masyarakat Kecamatan Padang Timur pada Pilkada Padang tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melihat adanya gejala- gejala alienasi politik yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Padang Timur pada Pilkada Langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang putaran kedua pada tahun 2014. Agar penelitian ini dapat terarah pada sasaran serta menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada hubungan antara keterikatan terhadap kewarganegaraan dengan alienasi politik masyarakat Kecamatan Padang Timur pada Pilkada Kota Padang Tahun 2014?
2. Apakah ada hubungan antara kekuatan afiliasi terhadap partai politik dengan alienasi politik masyarakat Kecamatan Padang Timur pada Pilkada Kota Padang Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah dipaparkan di dalam latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan hubungan antara keterikatan terhadap kewarganegaraan dengan alienasi politik masyarakat Kecamatan Padang Timur pada Pilkada Kota Padang Tahun 2014.

2. Untuk menjelaskan hubungan antara kekuatan afiliasi partai dengan alienasi politik masyarakat Kecamatan Padang Timur pada Pilkada Kota Padang Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dan sebagai bahan kajian akademis untuk memahami fenomena permasalahan yang berkaitan dengan keterasingan/Alienasi politik serta memahami sebab terjadinya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kota Padang, pelaksanaan pilkada kedepannya, elite-elite politik, kelompok kepentingan melihat gejala-gejala alienasi dan upaya untuk mengatasi alienasi yang terjadi pada masyarakat.

